

Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dinar Melani Hutajulu*¹, Yustirania Septiani², Jesika Melina Simamora³

^{1,2}Universitas Tidar, ³STIE Mars

Email : dinarmelani@untidar.ac.id*

Dikirim : 01 Maret 2021

Diterima : 22 April 2021

ABSTRACT

Indonesia's poverty condition in March 2019 recorded at 9.41 percent. Supposedly, Indonesia reaches the RPJMN target where the poverty level is planned at a 7-8 percent level. The High levels of rural poverty compared to urban areas exceeded the percentage of national poverty. Low wages are also an indication that the problem of poverty occurs continuously. This research is purpose to know how socio-economic variables such as human development, unemployment, wage, and inequality can affect poverty reduction in Indonesia. The research uses secondary data with source from the website of Statistics Indonesia (BPS) and the Databoks Katadata website. This study uses cross-section data with 34 provincial observations in the year 2019. This research used econometric methodologies with the regression of Ordinary Least Square. This research showed that poverty in Indonesia is still very dominant in the island of Papua, in the provinces of Papua and West Papua and in the island of Nusa Tenggara, in the provinces of West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara. Human development has a negative effect where every human development increase by one percent will reduces poverty in Indonesia by 5.69 percent. The declining unemployment rate has contributed to poverty reduction in Indonesia by 0.34 percent. Wages, in this case, can reduce poverty. Increasing wages by one percent can reduce poverty by 1.08 percent and vice versa. Reducing inequality by one percent can reduce poverty by up to 1.88 percent.

Keywords: *poverty, HDI, unemployment, wage, inequality*

ABSTRAK

Kondisi kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 tercatat sebesar 9.41 persen. Dalam pencapaiannya, ternyata Indonesia tidak mencapai target RPJMN dimana tingkat kemiskinan direncanakan pada level 7-8 persen. Tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dibandingkan perkotaan melampaui persentase kemiskinan nasional. Upah yang rendah juga menjadi indikasi masalah kemiskinan terjadi secara berkelanjutan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu melihat bagaimana variabel sosial ekonomi seperti pembangunan manusia, pengangguran, upah, dan ketimpangan dapat mempengaruhi perubahan kemiskinan Indonesia. Penelitian didasarkan pada data sekunder yang didapatkan dari situs Statistik Indonesia (BPS Indonesia) dan situs Databoks Katadata. Penelitian menggunakan *cross-section data* dan jumlah objek penelitian sebanyak 34 provinsi di Indonesia tahun 2019. Penelitian ini menggunakan

metodologi ekonometrik dengan regresi *Ordinary Least Square*. Hasil menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat didominasi pada pulau Papua yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat serta Nusa Tenggara yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pembangunan manusia berpengaruh negatif dimana setiap kenaikan pembangunan manusia sebesar satu persen akan mereduksi kemiskinan di Indonesia sebesar 5.69 persen. Tingkat pengangguran yang menurun telah menyumbang penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0.34 persen. Upah dalam hal ini mampu mereduksi kemiskinan. Peningkatan upah sebesar 1 persen dapat mereduksi kemiskinan sebesar 1.08 persen dan sebaliknya. Penurunan tingkat ketimpangan sebesar 1 persen dapat mereduksi kemiskinan sebesar 1.88 persen.

Kata kunci: kemiskinan, HDI, pengangguran, upah, ketimpangan

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi masalah di berbagai negara salah satunya Indonesia hingga saat ini. Kemiskinan juga selalu menjadi target pembangunan yang terus dikaji secara berkelanjutan dan selalu menjadi menarik. Jelas bagian ini menjadi penting bagi negara untuk dituntaskan. Kondisi kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2019 tercatat sebanyak 9.41 persen. Jika mengacu pada total penduduk, terdapat 25.14 juta penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka ini cukup besar (Statistik, 2019). Tentu saja banyaknya jumlah penduduk miskin akan menjadi sumber masalah pada perekonomian Indonesia. Hal ini telah menghambat program pemerintah dalam hal pembangunan manusia (Ritonga, 2015). Dimana orang-orang miskin, dengan keterbatasan ekonomi, tidak lagi akan melanjutkan sekolah. Dengan keadaan kemiskinan Indonesia sebesar 9.41 persen, pembangunan manusia menjadi yang paling terendah sebesar 0.707 pada 2018 jika dibandingkan dengan negara lain yaitu Thailand, Malaysia, Philipina, dan Singapura (Setiaji, 2020).

Mengacu pada perencanaan makro suatu negara, target perencanaan makro Indonesia berdasarkan kepada tujuan pencapaian SDGs. Perencanaan yang berdasarkan SDGs tersebut dapat dilihat pada penyusunan RPJMN suatu negara. Salah satu program SDGs yang menjadi poin pertama yaitu No Poverty (Infid, 2015). Hal ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dari segala aspek dan dimensi (Maizunati, 2017). Sehingga pemerintah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan menargetkan tingkat kemiskinan berada pada level 7-8 persen (Bappenas, 2017). Dalam pencapaiannya, ternyata Indonesia tidak mencapai target RPJMN dimana tingkat kemiskinan pada 2019 masih berada pada level 9.41 persen (Pebrianto, 2019).

Sementara itu, di perkotaan, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6.69 persen (9,9 juta orang). Sedangkan pada pedesaan, terdapat 12.85 persen (15.15 juta) penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Pusparisa, 2019; Ramdhani, 2019). Angka kemiskinan perkotaan masih lebih kecil dibandingkan dengan penduduk miskin skala nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan skala nasional, kemiskinan di

pedesaan bahkan jauh lebih tinggi. Terdapat indikasi ketidakmerataan antara kota dan desa. Hal ini menyebabkan tingginya angka penduduk miskin di desa. Pembangunan yang tidak merata bisa jadi merupakan penyebab banyaknya angka kemiskinan. Selain itu pendapatan masyarakat belum terdistribusi secara merata sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan dan sosial di masyarakat. Sebagai fakta, upah buruh tani pedesaan pada Oktober 2019 sebesar Rp. 38.278/hari (Jayani, 2020c; Setiaji, 2019). Dengan minimnya upah ini, masalah kemiskinan akan terus menerus terjadi.

Dari beberapa fakta diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin berada pada jumlah yang cukup besar, kemiskinan menjadi penghambat program pembangunan manusia, target pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan belum mencapai target RPJMN 2015-2019, tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dibandingkan perkotaan melampaui persentase kemiskinan nasional, serta upah yang rendah menjadi indikasi masalah kemiskinan terjadi secara terus menerus. Dari berbagai permasalahan diatas maka, Analisis Variabel Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia adalah penting untuk dibahas lebih mendalam. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana variabel sosial ekonomi seperti pembangunan manusia, pengangguran, upah, dan ketimpangan dapat mempengaruhi perubahan kemiskinan di Indonesia. Adapun manfaat penelitian yaitu diharapkan agar memberikan fakta mengenai kondisi kemiskinan Indonesia secara riil; menjadi bahan informasi dalam rangka menemukan solusi, pengambilan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membahas masalah yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia.

B. KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan merupakan keadaan ketidak-mampuan dalam pemenuhan kebutuhan baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Selain itu juga dikatakan kemiskinan dalam hal ini juga menyangkut sanitas serta hidup yang layak. Statistik Indonesia menyatakan konsep kemiskinan merupakan cerminan ketidakmampuan dalam segi financial dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang terukur melalui sisi pengeluaran (Statistik, 2020). Selain itu, kemiskinan juga menyangkut rendahnya akses pada asset asset yang produktif dan sumber daya seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital (Aryani & Rachmawati, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam poin SDGs karena dapat membawa dampak negatif yang sangat banyak dan akan mempengaruhi berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa dampak negatif yang banyak terlihat sebagai akibat dari kemiskinan adalah meningkatnya tindak kriminal, gangguan kesehatan, pengangguran, rendahnya pembangunan manusia, kesenjangan, memperlambat kemajuan bangsa dan sebagainya. Teori terdahulu telah menyimpulkan penyebab kemiskinan antara lain perbedaan sumber daya antar daerah, kualitas SDM dan perbedaan akses terhadap permodalan (Kuncoro dalam Rohima *et al.*, 2013)

Mengenai kaitan kemiskinan dengan variabel seperti pembangunan manusia, peningkatan pembangunan manusia dapat diperbaharui dengan meningkatkan akses konsumsi layanan sosial (pendidikan dan kesehatan) hal ini dijadikan sebagai upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Subandi dalam Syofya, 2018). Dalam perkembangannya, WHO telah menetapkan bahwa indeks pembangunan manusia dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kemiskinan di negara berkembang, walaupun hal ini masih menjadi pertentangan (Fosu, 2007; Mackie, 2012).

Penelitian empiris mengenai kemiskinan dan pembangunan manusia telah banyak dilakukan. Penelitian lain yang menggunakan metode regresi menemukan bahwa pembangunan manusia memiliki efek yang dominan terhadap pengurangan kemiskinan (Amaluddin et al., 2018; Subanidja & Suharto, 2014). Penelitian lain menggunakan regresi OLS dengan tipe data cross-section menyebutkan juga bahwa pengurangan kemiskinan terjadi karena mengadopsi strategi pembangunan manusia atau dikatakan memiliki hubungan negatif (Arimah, 2004).

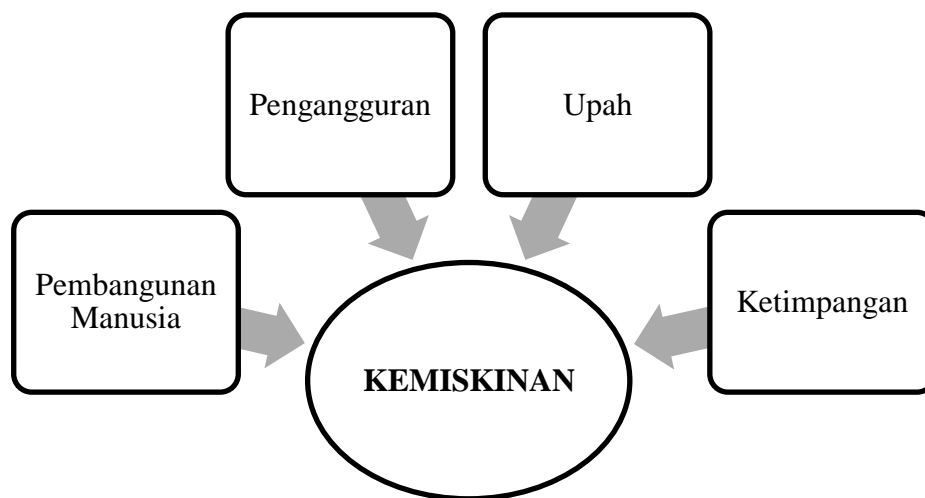
Variabel lain yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu pengangguran. Kedua hal ini adalah dua masalah kembar dalam perekonomian. Literatur terdahulu menyatakan dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik dan menganalisis 102 data cross-section ditemukan bahwa pengangguran menimbulkan hubungan yang positif terhadap kemiskinan (Mohammad & David, 2019). Pada penelitian lainnya, dengan menggunakan analisis VAR dinyatakan bahwa pengangguran telah menyebabkan kemiskinan (Siyan et al., 2016). Studi kasus di Indonesia, dengan menggunakan regresi data panel, juga menemukan bahwa beberapa variabel sosial-ekonomi termasuk didalamnya variabel pengangguran menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berdampak pada peningkatan kemiskinan (Sedana et al., 2019).

Faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan adalah upah. Badan Pusat Statistik sebagai badan pengolah data statistik di Indonesia menyatakan terdapat enam faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan salah satunya adalah upah (Anjaeni, 2020). Namun beberapa literatur menyebutkan bahwa kenaikan upah dapat mereduksi ataupun meningkatkan kemiskinan tergantung pada tertentu. Kemiskinan akan meningkat jika pekerja dengan penghasilan rendah kehilangan pekerjaannya dan mereka kesulitan menemukan pekerjaan sebagai akibat dari lapangan kerja sektor formal berkurang karena peningkatan upah (Gindling, 2014). Literatur lain menyatakan bahwa kemiskinan akan berkurang sebesar 5.7 persen jika terdapat peningkatan upah sebesar 1 persen (Kurniawati et al., 2017).

Selain itu kemiskinan juga memiliki kaitan dengan ketimpangan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ketimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Ginting, 2015; Wijayanto, 2016). Dikatakan juga bahwa peningkatan ketimpangan telah meningkatkan kemiskinan pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu dan ketimpangan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan (Fosu, 2017). Terdapat indikasi bahwa kemiskinan diperburuk oleh adanya ketimpangan baik di negara berkembang maupun negara maju.

Dari tinjauan literatur diatas, variabel pembangunan manusia, pengangguran, upah dan ketimpangan digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun pemilihan variabel-variabel diatas didasarkan oleh seringnya variabel-variabel tersebut dijadikan sebagai fokus pemerintah dalam membuat strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga dirasa tepat untuk mengaitkan variabel tersebut kedalam sebuah penelitian untuk melihat perkembangannya dalam mereduksi kemiskinan di Indonesia. Adanya keterkaitan antara empat variabel di atas tidak hanya dijelaskan secara empiris tetapi juga dinyatakan dalam kerangka pemikiran yang tertera di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



C. PELAKSANA DAN METODE

Data yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis yaitu data sekunder yang didapatkan dari situs Statistik Indonesia (BPS Indonesia) dan situs Databoks Katadata. Penelitian menggunakan *cross-section data* dengan jumlah objek sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Data kemiskinan di ambil dari tabel Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi Tahun 2007-2019. Data Pembangunan Manusia di ambil dari tabel Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Provinsi Tahun 2010-2019. Data pengangguran di ambil dari tabel angka TPT pada Provinsi di Indonesia Tahun 1986-2019. Data upah di ambil dari tabel nilai Rata Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan para Buruh atau Karyawan atau Pegawai berdasarkan Provinsi serta Jenis Pekerjaan Utama Tahun 2019. Data Ketimpangan di ambil dari Grafik Rasio Gini Seluruh Povinsi di Indonesia Tahun 2019.

Penelitian menggunakan alat analisis regresi dengan penerapan metodologi ekonometrik. Gujarati and Porter (2009) menyatakan regresi adalah alat analisis yang dapat mengukur arah dan besar pengaruh variabel regresor terhadap variabel regresan. Berikut ini disajikan persamaan regresi pada penelitian ini.

$$\log POVR = \beta_0 + \beta_1 \log HDI_i + \beta_2 \log UNEMP_i + \beta_3 \log WAGE_i + \beta_4 \log INEQ_i + \varepsilon_i$$

dimana :

POVR = Kemiskinan per Provinsi (persen)

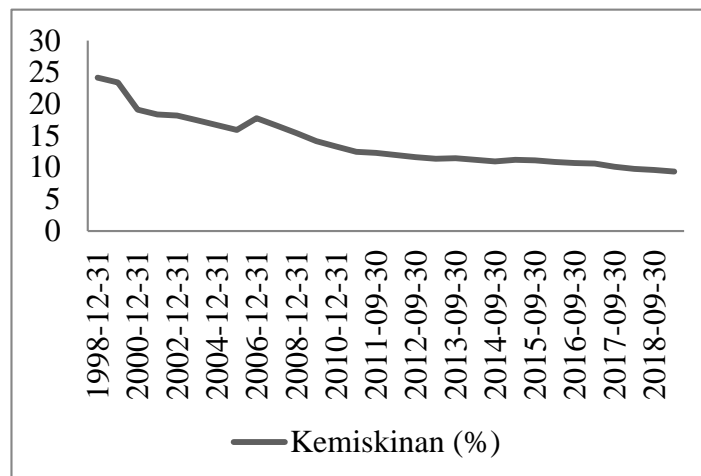
- HDI = Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi (angka indeks)
- UNEMP = Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (persen)
- WAGE = Rata-Rata Gaji Bersih per Bulan, Buruh atau Karyawan/Pegawai (rupiah)
- INEQ = Rasio Gini per Provinsi

Pada variabel kemiskinan, nilai persentase kemiskinan didapatkan dari persen penduduk dibawah GK (Garis Kemiskinan). Nilai GK didapatkan dengan menjumlahkan nilai Garis Kemiskinan Makanan dengan non Makanan meliputi rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada variabel pembangunan manusia, nilai indeks pembangunan manusia didapatkan dari rerata geometrik indeks kesehatan, indeks pendidikan, serta indeks pengeluaran. Pada variabel pengangguran, nilai TPT didapatkan dari persen total pengangguran terhadap total angkatan kerja. Pada variabel upah, dengan melihat rata-rata penghasilan selama sebulan saat bekerja. Pada variabel ketimpangan, nilai didapatkan dengan melakukan perhitungan koefisien gini. Indeks koefisien gini berada pada rentang nilai 0-1, dimana jika nilai koefisien semakin mendekati nol maka terjadi pemerataan dan pada koefisien yang mendekati 1 maka semakin besar ketimpangan.

Regresi dilakukan dengan menggunakan model regresi *Ordinary Least Square* dimana dalam interpretasi nilai diharapkan tidak terjadi masalah bias. Sehingga penelitian ini melakukan uji asumsi klasik agar dapat mengedepankan terpenuhinya asumsi BEST (*Best Linear Unbiased Estimator*). Perlu untuk melakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji auto-korelasi, dan uji multikolinearitas. Dalam uji normalitas, jika nilai *prob. Jarque – Bera* > sig 0.05 maka model tersebut terdistribusi normal. Pada uji autokorelasi, jika nilai *Durbin-Watson* pada rentang 1.55 – 2.46 maka disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi (Gunawan, 2017). Pada uji heterokedastisitas, jika nilai *prob. F* > sig 0.05 dapat dikatakan model bebas dari masalah heterokedastisitas. Pada uji multikolinearitas, dengan melihat nilai *Centered VIF*, dimana ketika nilai *VIF* < 10, maka model tidak terkena masalah multikolinearitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan penurunan yang cukup nyata dari tahun 1998 hingga 2019. Tercatat hingga pada Maret 2019 kemiskinan berada pada tingkat 9.41 persen. Merupakan satu kemajuan yang baik dalam menunjang target utama program SDGs yaitu no poverty.

Gambar 2. Persentase Kemiskinan 1998-Maret 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

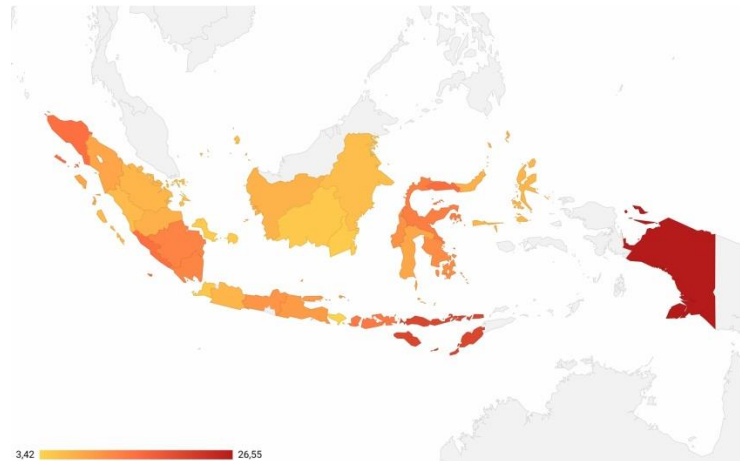
Namun angka tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa Indonesia sudah benar-benar terbebas dari masalah tersebut. Sebanyak 25.14 juta penduduk berada di bawah GK (Garis Kemiskinan) dan tersebar di Indonesia. Angka tersebut menjadi masalah yang serius mengingat dalam setiap hari, pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat secara signifikan. Kemiskinan sejumlah 25.14 juta tersebut ternyata di dominasi oleh penduduk miskin yang ada di perdesaan. World Bank juga menetapkan bahwa Indonesia didominasi oleh penduduk miskin perdesaan non-metro sebesar 14.6 persen dari jumlah populasi penduduk perdesaan non-metro (World Bank, 2019). Kemudian terdapat 27.9 persen penduduk yang masuk kedalam kategori rentan miskin pada perdesaan non-metro. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit saja terjadi kenaikan harga terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat. Dapat dipastikan bahwa masyarakat rentan miskin di perdesaan tersebut akan menjadi masyarakat miskin.

Pada dasarnya, pengukuran kemiskinan di Indonesia dihitung dengan pendekatan kemampuan pemenuhan *basic need approach*. Hal ini melihat kemampuan masyarakat dalam pemenuhan makanan dan pemenuhan kebutuhan penting lain yang bukan makanan dari sisi pengeluaran. Namun komposisi pengukuran kemiskinan ini sebenarnya di dominasi makanan sekitar 73.75 persen. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia saat ini selalu berupaya menjaga kestabilan harga barang makanan agar tidak berfluktuasi, karena bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. Karena gejolak dan ketidakstabilan harga dapat membuat gejolak terhadap perhitungan garis kemiskinan. Dan tentu saja hal ini dapat menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin seketika dari kenaikan harga yang terjadi.

Dalam melihat persebaran kemiskinan di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana persebaran kemiskinan berdasarkan persentase kemiskinan pada setiap provinsi di Indonesia. Berikut di bawah ini merupakan data persebaran kemiskinan pada Tahun 2019.

Terdapat beberapa provinsi yang menjadi pusat persentase kemiskinan terbanyak di Indonesia.

Gambar 3. Persentase Kemiskinan Provinsi-Provinsi Indonesia Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Indikator berwarna merah menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan adalah yang tertinggi dan semakin kuning maka tingkat kemiskinan semakin rendah. Dari gambar diatas, kemiskinan di Indonesia masih sangat didominasi pada pulau Papua yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua dan juga Kepulauan Nusa Tenggara yaitu pada Provinsi NTT dan NTB. Tahun 2020, kemiskinan provinsi papua berkisar pada angka 26.64 persen, pada Provinsi Papua Barat sebesar 21.37 persen, dan pada Provinsi NTT sebesar 20.90 persen (Jayani, 2020a). Terlihat bahwa dominasi penduduk miskin masih berada di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi kemiskinan yang tinggi ini berdampak pada kualitas SDM di daerah tersebut (Maulana, 2021; Panjawa, 2020). Salah satu hal penting yang menjadi penyebab kemiskinan di Papua dan NTT adalah karena pemerintah yang belum sepenuhnya melakukan pemerataan pada daerah di kawasan timur Indonesia ini (Lukmansyah, 2018). Hal inilah yang memunculkan indikasi bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan sehingga kemiskinan terbanyak terletak pada Kawasan Timur saja. Faktor-faktor lain seperti pembangunan manusia, pengangguran dan upah juga merupakan hal yang diduga menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Dalam membahas variabel tersebut, berikut ini data yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut diatas :

Tabel 1

Data Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah dan Ketimpangan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2019

PROVINSI	POVERTY (Persen)	HDI (Angka Indeks)	UNEMPLOYMENT (Persen)	WAGE (Rupiah)	INEQUALITY (Angka Indeks)
Aceh	15.01	71.90	5.53	2,362,295	0.32
Sumatera Utara	8.63	71.74	5.56	2,474,775	0.32
Sumatera Barat	6.29	72.39	5.29	2,681,765	0.31
Riau	6.90	73.00	5.57	2,800,134	0.33
Jambi	7.51	71.26	3.62	2,321,391	0.32
Sumatera Selatan	12.56	70.02	3.99	2,309,090	0.33
Bengkulu	14.91	71.21	2.50	2,495,741	0.34
Lampung	12.30	69.57	3.96	2,281,692	0.33
Kep. Bangka Belitung	4.50	71.30	3.39	2,937,123	0.27
Kep. Riau	5.80	75.48	6.41	4,276,448	0.34
DKI Jakarta	3.42	80.76	5.13	4,463,387	0.39
Jawa Barat	6.82	72.03	7.73	3,337,572	0.40
Jawa Tengah	10.58	71.73	4.22	2,190,251	0.36
DI Yogyakarta	11.44	79.99	2.86	2,311,599	0.42
Jawa Timur	10.20	71.50	3.83	2,479,909	0.37
Banten	4.94	72.44	7.58	3,842,832	0.37
Bali	3.61	75.38	1.19	2,988,555	0.37
Nusa Tenggara Barat	13.88	68.14	3.27	2,339,860	0.38
Nusa Tenggara Timur	20.62	65.23	3.10	2,112,649	0.36
Kalimantan Barat	7.28	67.65	4.14	2,528,607	0.33
Kalimantan Tengah	4.81	70.91	3.33	2,999,390	0.34
Kalimantan Selatan	4.47	70.72	3.50	2,851,734	0.33
Kalimantan Timur	5.91	76.61	6.66	3,906,408	0.33
Kalimantan Utara	6.49	71.15	5.80	3,374,377	0.30
Sulawesi Utara	7.51	72.99	5.37	3,315,106	0.37
Sulawesi Tengah	13.18	69.50	3.54	2,456,458	0.33
Sulawesi Selatan	8.56	71.66	5.42	2,855,170	0.39
Sulawesi Tenggara	11.04	71.20	2.96	2,624,771	0.40
Gorontalo	15.31	68.49	3.47	2,403,484	0.41
Sulawesi Barat	10.95	65.73	1.45	2,161,380	0.37
Maluku	17.65	69.45	6.91	2,941,408	0.32
Maluku Utara	6.91	68.70	5.09	2,812,681	0.31
Papua Barat	21.51	64.70	5.28	3,364,838	0.39

Papua	26.55	60.84	3.42	4,000,706	0.39
-------	-------	-------	------	-----------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019, diolah

Dari data yang telah disajikan diatas maka tahap analisis dilakukan. Di bawah ini merupakan hasil analisis data dengan model Regresi *Ordinary Least Square* untuk melihat pengaruh variabel sosial ekonomi seperti pembangunan manusia, pengangguran, upah dan ketimpangan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2
Hasil Regresi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob. t-stat
C	44.0188	6.0770	7.2434	0.0000
Log (HDI)	-5.6954	1.0855	-5.2465	0.0000
Log (UNEMP)	0.3496	0.1618	2.1605	0.0391
Log (WAGE)	-1.0820	0.3284	-3.2941	0.0026
Log (INEQ)	1.8802	0.5800	3.2413	0.0030
Dependent Variable : Log (POV)				
R-square	0.6457		F-statistic	13.2171
Adj R-square	0.5969		Prob (F-stat.)	0.0000

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan hasil regresi diatas terlihat bahwa prob F-stat sebesar $0.0000 < 0.05$ maka variabel pembangunan manusia, pengangguran, upah dan ketimpangan secara bersama-sama telah mempengaruhi kemiskinan Indonesia. nilai *R-squared* yaitu 0.64 dapat diartikan bahwa variabel regresor telah menjelaskan variabel regresan sebesar 64 persen dan sebesar 36 persen sisanya dapat dijelaskan variabel lainnya. Dari hasil pada tabel 1, maka persamaan regresinya adalah seperti berikut ini.

$$\text{LogPOVR} = 44.01 - 5.69\text{LogHDI}_i + 0.34\text{LogUNEMP}_i + 1.08\text{LogWAGE}_i + 1.88\text{LogINEQ}_i + \varepsilon_i$$

Secara parsial dapat dilihat bahwa variabel pembangunan manusia memiliki prob. t-stat sebesar $0.0000 < 0.05$. Sehingga memberikan arti bahwa variabel pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan pada kemiskinan di Indonesia. Pengaruh pembangunan manusia memiliki arah yang negatif yang berarti setiap kenaikan pembangunan manusia dalam satu persen akan mereduksi tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 5.69 persen. Pada variabel pengangguran, nilai prob. t-stat sebesar $0.0391 < 0.05$. Angka ini menunjukkan bagaimana pengangguran berpengaruh signifikan dalam mereduksi kemiskinan Indonesia. Pengaruh pengangguran ternyata menghasilkan arah yang positif yang berarti pada peningkatan angka pengangguran dalam satu persen akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 0.34 persen. Pada variabel upah, prob. t-stat sebesar $0.0026 < 0.05$ menjelaskan bahwa upah mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Pengaruh variabel tersebut memiliki arah negatif dimana setiap pertambahan nilai upah sebesar satu persen maka akan mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak 1.08 persen. Pada variabel

ketimpangan, terlihat bahwa nilai prob. t-stat sebesar $0.0030 < 0.05$ menjelaskan bahwa ketimpangan mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Pengaruh variabel tersebut memiliki arah yang positif dimana setiap kenaikan ketimpangan sebesar satu persen, akan mempengaruhi peningkatan kemiskinan di Indonesia sebanyak 1.88 persen.

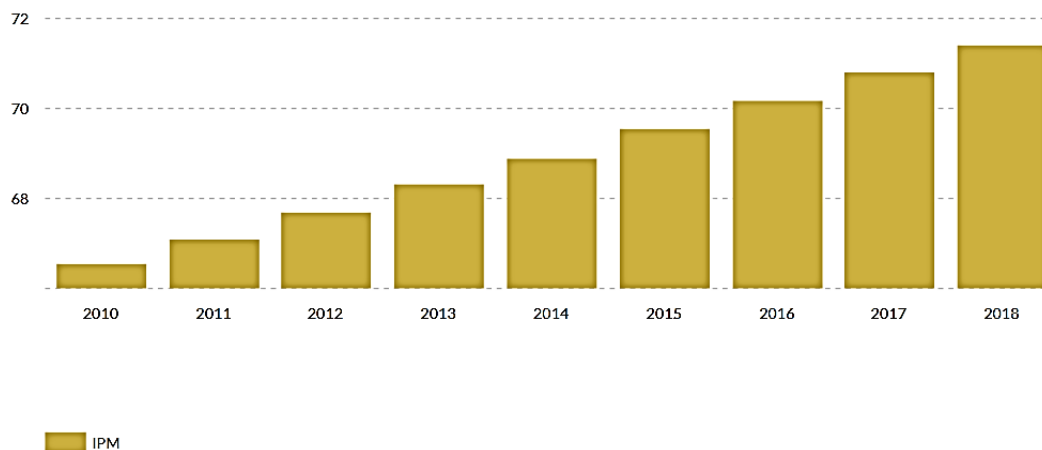
Tabel 3
Uji Asumsi Klasik

Normalitas		Autokorelasi (Breusch-Godfrey)	
Jarque-Bera	0.8187	Prob. F(2,27)	0.6613
Prob.	0.6640	Prob. Chi-Square (2)	0.5988
Heterokedastisitas (Glejser)		Multikolinearitas (VIF)	
Prob. F(4,29)	0.8991	Log (HDI)	1.0754
		Log (UNEMP)	1.3522
Prob. Chi-Square (4)	0.8795	Log (WAGE)	1.3670
		Log (INEQ)	1.0705

Sumber : Data Sekunder, diolah

Setelah melakukan regresi OLS maka kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan tidak ada permasalahan bias dalam interpretasi model diatas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, nilai prob. Jarque-Bera sebesar $0.6640 > 0.05$ maka model tersebut normal. Uji autokorelasi menunjukkan bahwa prob. Chi-Square sebesar $0.5988 > 0.5$ maka model tidak ada masalah autokorelasi. Uji heterokedastisitas menunjukkan hasil bahwa prob. Chi-Square $0.8795 > 0.05$ maka model tidak mengalami heterokedastisitas. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari keempat variabel regresor tersebut < 10 maka tidak terdapat korelasi antar variabel regresor. Maka ditarik kesimpulan model terbebas dari masalah bias.

Berdasarkan pada hasil analisis diatas telah disebutkan mengenai empat variabel diatas ternyata memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kemiskinan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, terdapat fakta bahwa seiring dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, ternyata IPM pun meningkat tiap tahun. Tahun 2010, IPM sebesar 66.53 hingga pada 2018 angka indeks menjadi 71.39.

Gambar 4. Angka IPM Tahun 2010 - 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia perlu kiranya terus dilanjutkan untuk mereduksi kemiskinan tersebut. Pemerintah memiliki peran penting terhadap menambahkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. WHO dalam hal ini telah menyatakan bahwa berbagai strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia juga secara tidak langsung menjadi strategi dalam mereduksi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Amaluddin et al. (2018), Arimah (2004), Subanidja & Suharto (2014) yang menyatakan pembangunan manusia dapat mereduksi kemiskinan.

Namun perlu kiranya juga pemerataan pembangunan manusia baik di perkotaan maupun di perdesaan. Mengingat tingginya nilai kemiskinan di perdesaan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Hal ini didasarkan pada kondisi kemiskinan di perdesaan pada 2019 yaitu sebesar 15.15 persen sedangkan kondisi kemiskinan perkotaan pada 2019 yaitu sebesar 9.99 persen (Pusparisa, 2019). Berdasarkan hal ini, arah pembangunan manusia sebaiknya dimulai dari pinggiran atau wilayah perdesaan dan juga daerah 3T yaitu Terluar, Terdalam, dan Tertinggal.

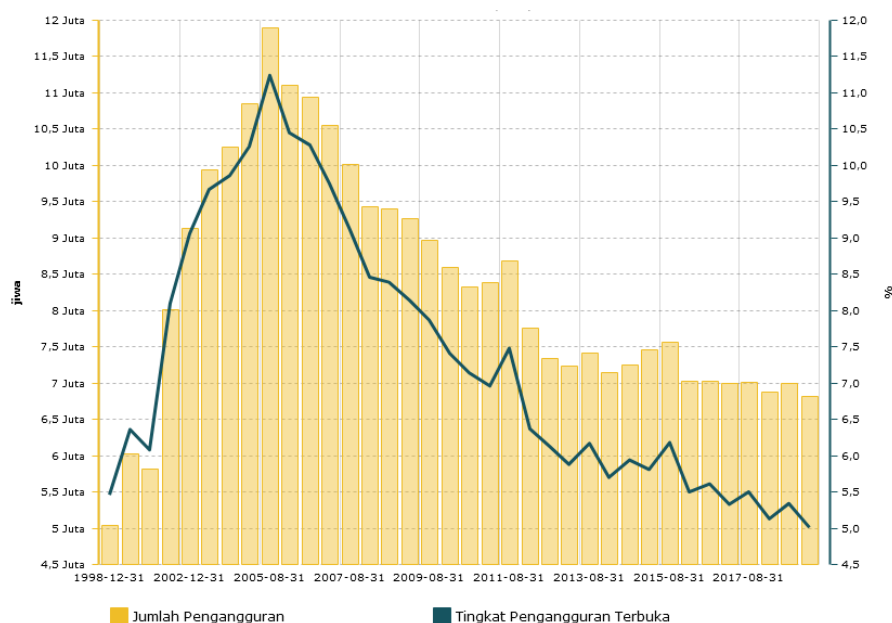
Pada tahun 2019, rata-rata tingkat pembangunan manusia tertinggi berada di Pulau Jawa dengan Provinsi D.K.I. Jakarta sebesar 80.76 dan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 79.99 menjadi urutan 2 teratas di Jawa (BPS, 2020a). Pemerintah perlu menekankan pembangunan manusia pada wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu Kep. Papua dan Nusa Tenggara. Dimana diketahui dengan jelas bahwa tingkat pembangunan manusia terendah pada 2019 ada pada Provinsi Papua yaitu 60.84, Provinsi Papua Barat dengan indeks sebesar 64.70 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 65.23 (BPS, 2020a).

Dalam kaitan antara pengangguran dan kemiskinan, dalam persebaran pengangguran di Indonesia, dua provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada februari 2019 terletak pada Provinsi Jawa Barat sebesar 7.78 persen dan Banten sebesar 7.55 persen (BPS,

2020c). Sedangkan D.K.I. Jakarta yang merupakan daerah padat penduduk memiliki tingkat pengangguran sebesar 5.50 persen (BPS, 2020c). Hal yang menyebabkan Jawa Barat dan Banten menjadi penyumbang pengangguran terbesar dikarenakan selama ini, pusat industri banyak terletak di dua provinsi tersebut. Namun pada 2019, banyak dari industri tersebut yang berpindah ke provinsi lain di Jawa. Hal ini disebabkan karena besaran UMR di Provinsi Jawa Barat dan Banten terlalu tinggi (Agustiyanti, 2019; Suhendra, 2019). Keputusan pemerintah dalam penetapan UMR yang terlalu tinggi di 2 provinsi ini, pada tahun 2019, menyebabkan tingginya pengangguran di dua provinsi tersebut. Padahal sebelumnya, masyarakat dari provinsi lain sangat banyak bermigrasi ke Provinsi Jawa Barat dan Banten tersebut karena banyaknya industri disana.

Sedangkan tingkat pengangguran terendah di Indonesia pada 2019 berada di Provinsi Bali sebesar 1.57 persen (BPS, 2020c). Hal ini disebabkan besarnya investasi dan lapangan pekerjaan di Provinsi Bali terlebih banyaknya perhotelan dan lapangan pekerjaan di industri pariwisata serta IKM terus bertumbuh karena tingginya permintaan. Inilah yang menjadi penyebab rendahnya pengangguran di Provinsi Bali (Maya, 2019). Terendah ke-2 pada tahun 2019 yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2.98 persen (BPS, 2020c). Sedangkan pada Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat didominasi oleh lulusan SLTP ke bawah dan lapangan pekerjaan juga tidak menuntut lulusan berpendidikan tinggi (Hanapi, 2020). Sehingga masyarakat yang didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah tersebut banyak yang terserap oleh lapangan pekerjaan. Justru pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat cenderung didominasi oleh masyarakat lulusan SMA dan SMK karena memang kebutuhan lapangan pekerjaan di provinsi tersebut adalah lulusan berpendidikan rendah.

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Tahun 1998-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari hasil analisis diatas dinyatakan pengangguran memiliki pengaruh yang positif serta signifikan dalam mereduksi kemiskinan. Melihat kecenderungan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia setiap tahunnya. Ternyata pengangguran di Indonesia juga menurun setiap tahunnya. Data menjelaskan pada tahun 1998, pengangguran adalah sebesar 5 juta penduduk atau 5.46 persen (BPS, 2019). Pada tahun 2005, pengangguran di Indonesia sebesar 11.9 juta penduduk (11.24 persen) adalah tertinggi sejak 1998 (BPS, 2015). Kemudian pengangguran terus menerus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 6.8 juta penduduk (5.23 persen) menjadi tingkat pengangguran terendah sejak tahun 1998 (BPS, 2021). Kecenderungan kemiskinan yang terus menurun dan pengangguran di Indonesia juga menurun menyebabkan variabel ini berpengaruh secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Mohammad & David (2019), Sedana et al. (2019), Siyan et al. (2016) dimana pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Dalam kaitan kemiskinan dan upah, diketahui bahwa upah ternyata berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Kenaikan upah dikatakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika dilihat, bahwa upah merupakan peran penting dalam masalah kemiskinan. Karena indikator kemiskinan Indonesia terutama dilihat dari jumlah penghasilan. Rata-rata upah bersih/bulan terendah pada tahun 2019 berada di Prov. Sulawesi Barat sebanyak 2.110.622 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.146.992 (BPS, 2020b). Sedangkan rata-rata upah bersih/bulan tertinggi terdapat pada Prov. D.K.I. Jakarta sebanyak 4.463.387 dan Provinsi Papua sebesar 4.000.706 berdasarkan data BPS 2019 yang terdapat pada tabel 1. Rata-rata upah bersih/bulan di DKI Jakarta tinggi disebabkan kota tersebut merupakan ibukota negara dan biaya hidup yang relatif tinggi menyebabkan rata-rata upah bersih/bulan menjadi tinggi (Citradi, 2019). Sedangkan di Provinsi Papua, rata-rata upah bersih/bulan menjadi tinggi disebabkan daerah tersebut merupakan daerah tambang dengan mayoritas pekerja adalah pekerja tambang serta tingginya biaya hidup karena infrastruktur Papua yang kurang mendukung dan merata (Ambarita, 2011). Hal ini menyebabkan berbagai harga barang disana menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Bukan dikarenakan kemajuan dari kota tersebut. Jika di DKI Jakarta dengan rata-rata upah bersih/bulan sebesar 4.000.706 dapat memberikan hidup yang cukup baik karena harga barang bervariasi. Sedangkan dengan rata-rata upah bersih/bulan 4.463.387 di Provinsi Papua tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata. Sehingga menyebabkan kemiskinan terparah berada di Papua (Mustafa, 2020).

Jika dengan meningkatkan upah dapat menyebabkan kemiskinan berkurang. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali tingkat upah di berbagai daerah di Indonesia. Namun diharapkan kenaikan upah bukan karena peningkatan harga-harga barang tetapi karena cerminan negara serta para pengusaha yang semakin sejahtera. Jika perusahaan dan industri semakin sejahtera, perekonomian semakin bergairah, maka pertumbuhan upah berjalan dalam prosesnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian sejalan dengan tulisan Kurniawati et al. (2017) dimana ia menyatakan kenaikan upah dari sisi masyarakat dapat mereduksi kemiskinan.

Variabel terakhir dalam penelitian ini yang juga dapat meningkatkan kemiskinan adalah ketimpangan. Kemiskinan akan meningkat sebesar 1.88 persen jika terjadi ketimpangan sebesar 1 persen. Dapat dikatakan ketimpangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan kemiskinan. Di Indonesia, provinsi dengan ketimpangan tertinggi adalah DI Yogyakarta dengan angka sebesar 0.42 pada tahun 2019 (Jayani, 2020b). Hal yang menyebabkan ketimpangan ini salah satunya adalah polarisasi kepemilikan aset produktif oleh penduduk kaya dimana hanya orang-orang yang mampu yang dapat mengembangkan aset menjadi lebih besar (Pradana, 2021). Selain itu, tingginya angka ketimpangan di Provinsi D.I. Yogyakarta terlihat dari distribusi pengeluaran penduduk, dimana 40 persen penduduk termiskin hanya menghabiskan pengeluaran sebesar 14.14 persen dari keseluruhan pengeluaran penduduk Yogyakarta (BPS, 2017). Tipikal ketimpangan ini telah menyebabkan daerah perkotaan memiliki perbedaan perkembangan yang cukup mencolok dengan daerah pinggiran.

Sedangkan tingkat ketimpangan paling rendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini disebabkan, pada provinsi tersebut tidak ada jaringan waralaba minimarket. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat seperti warung-warung dan IKM berjalan dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat provinsi itu sendiri. Terdapat pemerataan pendapatan di masyarakat pada daerah tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat kemiskinan di sana relatif rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Fosu (2017), Ginting (2015), Wijayanto (2016) yang menyatakan bahwa ketimpangan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kemiskinan Indonesia masih merupakan masalah yang menjadi perhatian, terutama kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan penting untuk dituntaskan karena menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat serta negara itu sendiri. Dari hasil analisis yang dilakukan, secara keseluruhan, variabel sosial ekonomi seperti pembangunan manusia, pengangguran, upah dan ketimpangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pembangunan manusia menjadi variabel dengan persentase tertinggi dalam mereduksi kemiskinan. Kenaikan pembangunan manusia sebesar satu persen dapat mereduksi kemiskinan sebesar 5.69 persen. Tingkat pengangguran yang menurun telah menyumbang penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0.34 persen. Upah dalam hal ini mampu mereduksi kemiskinan. Peningkatan upah sebesar 1 persen dapat mereduksi kemiskinan sebesar 1.08 persen dan sebaliknya. Penurunan tingkat ketimpangan sebesar 1 persen dapat mereduksi kemiskinan sebesar 1.88 persen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pembangunan manusia merupakan variabel tertinggi dalam mereduksi kemiskinan. Namun masih terdapat kelemahan pada IPM di Indonesia dimana kurang meratanya pembangunan manusia terlebih antara perdesaan dan perkotaan.

Bagi pemerintah maupun pemangku kebijakan, peningkatan skill masyarakat pada sektor padat kerja serta bantuan pendidikan dapat membantu peningkatan pembangunan manusia di Indonesia. Pemeliharaan iklim investasi yang baik juga dapat menambah industri baru serta semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu pengurangan pengangguran yang akan mempengaruhi pada kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pemerataan di semua bidang, bukan hanya pembangunan manusia, tetapi juga pada upah di berbagai daerah serta pembangunan yang merata. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik masing-masing alam yang berbeda. Sehingga penting untuk dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi hal ini juga demi pengurangan ketimpangan di berbagai daerah. Sinergitas pemerataan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan lapangan pekerjaan, pemerataan upah di setiap daerah di Indonesia, akan menjadi poin penting dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian dimana hanya terbatas pada variabel yang dianggap memungkinkan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Serta hanya mengkaji kemiskinan berdasarkan provinsi-provinsi di Indonesia Sehingga diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalam lagi dalam mengkaji keefektifan variabel-variabel ini dalam mengurangi kemiskinan daerah-daerah di Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti. (2019). Kebijakan Upah Pekerja yang Timpang Memicu Tren Relokasi Industri. Retrieved April 17, 2021, from katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/agustiyanti/indepth/5e9a4c4bd28c6/kebijakan-upah-pekerja-yang-timpang-memicu-tren-relokasi-industri>
- Amaluddin, Payapo, R. W., Laitupa, A. A., & Serang, M. R. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 325–330.
- Ambarita, B. (2011). Mengapa Gaji di Papua Paling Tinggi ? Retrieved April 17, 2021, from [viva.co.id](https://www.viva.co.id) website: <https://www.viva.co.id/arsip/198028-mengapa-gaji-di-papua-paling-tinggi>
- Anjaeni, R. (2020). Enam Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Versi BPS. Retrieved April 7, 2020, from nasional.kontan.co.id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>
- Arimah, B. (2004). Poverty Reduction and Human Development in Africa. *Journal of Human Development*, 5(3), 399–415. <https://doi.org/10.1080/1464988042000277260>
- Aryani, D. S., & Rachmawati, Y. (2019). Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang dengan Menggunakan Model Cibest. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 93–98. Retrieved from <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/844>
- Bappenas. (2017). *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019*. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/evaluasi-paruh-waktu-rpjmn-2015-2019/>
- BPS. (2015). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2005-2006*.

- Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/8/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2017). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta September 2017 Meningkat: Gini Ratio Pada September 2017 Sebesar 0,440. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/820/-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2017-meningkat---gini-ratio-pada-september-2017-sebesar-0-440.html>
- BPS. (2019). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 1997-1998. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 1997-1998
- BPS. (2020a). Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2018-2020. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2020b). Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2019. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/statictable/2019/08/02/2070/rata-rata-upahgaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-jenis-pekerjaan-utama-2019.html>
- BPS. (2020c). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020. Retrieved April 17, 2021, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Citradi, T. (2019). UMP Naik 8,51% Apakah Pekerja Bisa Makin Sejahtera? Retrieved April 17, 2021, from cnbcindonesia.com website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191018174957-4-108226/ump-naik-851-apakah-pekerja-bisa-makin-sejahtera>
- Fosu, A. K. (2007). Poverty and development. *Bulletin of the World Health Organization*, 85(10), 733–820. Retrieved from <https://www.who.int/bulletin/volumes/85/10/07-045955/en/>
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306–336. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>
- Gindling, T. (2014). Does Increasing The Minimum Wage Reduce Poverty in Developing Countries? *IZA World of Labor*, 30(May), 1–10. <https://doi.org/10.15185/izawol.30>
- Ginting, A. M. (2015). The Influence of Regional Disparity on Poverty in Indonesia During 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 45–58.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic of Econometric. In *Econometrics* (Fifth). https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5_17
- Gunawan, I. (2017). *Pengantar Statistika Inferensial* (Pertama). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanapi, F. (2020). Pengangguran di Sulbar Februari 2020 Capai 2,61 Persen. Retrieved April 17, 2021, from antaranews.com website:

- <https://www.antaranews.com/berita/1469853/pengangguran-di-sulbar-februari-2020-capai-261-persen>
- Infid. (2015). Sustainable Development Goals. Retrieved March 27, 2020, from International NGO Forum on Indonesian Development website: <https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition>
- Jayani, D. H. (2020a). 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia per Maret 2020. Retrieved April 17, 2021, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020>
- Jayani, D. H. (2020b). Daftar Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi 2019. Retrieved April 17, 2021, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/15/ini-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi-2019>
- Jayani, D. H. (2020c). Upah Buruh Tani 2019 Menurun. Retrieved March 30, 2020, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/20/upah-buruh-tani-2019-menurun>
- Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Indrasari, D. P. R. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 233. <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170207.id>
- Lukmansyah, O. (2018). Empat Hal Dibalik Angka Kemiskinan Indonesia yang Disebut Mencatat “Sejarah.”
- Mackie, E. (2012). *Understanding Poverty: The Human Development Approach* (pp. 1–6). pp. 1–6. Retrieved from <http://www.e-ir.info/2012/04/17/understanding-poverty-the-human-development-approach/>
- Maizunati, N. A. (2017). Pengaruh Dimensi Sosial dan Lingkungan Terhadap Tingkat Konsumsi Pangan pada Penduduk Miskin Perkotaan di Jawa Tengah. *REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 227–248. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/532>
- Maulana, Y. (2021). Kemiskinan dan Penduduk di Papua. Retrieved April 17, 2021, from papua.bkkbn.go.id website: <http://papua.bkkbn.go.id/?p=2702>
- Maya, C. (2019). Angka Pengangguran Bali Terendah Se-Indonesia. Retrieved April 17, 2021, from balipost.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258>
- Mohammad, U. F., & David, J. (2019). The Relationship between Poverty and Unemployment in Niger State. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 71–78. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i1.6725>
- Mustafa, A. (2020). Papua Masih Jadi Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi. Retrieved April 17, 2021, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi>
- Panjawa, J. L. (2020). Heterogenitas Kemiskinan Dan Determinannya : Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Papua. *Jiep*, 20(2), 85–96. <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i2.41160>
- Pebrianto, F. (2019). Indef: Pengentasan Kemiskinan Era Jokowi Tak Capai Target RPJMN. Retrieved March 30, 2020, from bisnis.tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/1225177/indef-pengentasan-kemiskinan-era-jokowi-tak-capai-target-rpjmn/full&view=ok>

- Pradana, W. E. (2021). Polarisasi Kepemilikan Aset dan Dualisme Ekonomi Bayangi Ketimpangan di Jogja. Retrieved April 17, 2021, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/pandangan-jogja/polarisasi-kepemilikan-aset-dan-dualisme-ekonomi-bayangi-ketimpangan-di-jogja-1vBhcKoKNES/full>
- Pusparisa, Y. (2019). Jumlah Penduduk Miskin di Desa dan Kota Mengalami Penurunan. Retrieved March 30, 2020, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/20/jumlah-penduduk-miskin-di-desa-dan-kota-mengalami-penurunan>
- Ramdhani, D. (2019). Pemberdayaan Penduduk dalam Kemiskinan Pedesaan. Retrieved March 30, 2020, from www.ayobandung.com website: <https://www.ayobandung.com/read/2019/08/20/61140/pemberdayaan-penduduk-dalam-kemiskinan-pedesaan>
- Ritonga, R. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Retrieved March 30, 2020, from mediaindonesia.com website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/1241-kemiskinan-dan-pembangunan-manusia>
- Rohima, S., Suman, A., Manzilati, A., & Ashar, K. (2013). Vicious Circle Analysis of Poverty and Entrepreneurship. *IOSR Journal of Business and Management*, 7(1), 33–46. <https://doi.org/10.9790/487x-0713346>
- Sedana, Y. I. M. S., Sri, B. M. K., Djinar, S. N., & Nyoman, S. I. A. (2019). Socio-Economic Factors Affecting Poverty in Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 90(6), 192–202. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-06.25>
- Setiaji, H. (2019). Pantasan RI Terancam Krisis Petani, Upah Kecil & Miskin Terus. Retrieved March 30, 2020, from cnbcindonesia.com website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115141634-4-115591/pantesan-ri-terancam-krisis-petani-upah-kecil-miskin-terus>
- Setiaji, H. (2020). Ini yang Bikin Orang Miskin di RI Susah “Naik Kelas.” Retrieved March 30, 2020, from cnbcindonesia.com website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200203151826-4-134832/ini-yang-bikin-orang-miskin-di-ri-susah-naik-kelas>
- Siyani, P., Adegioriola, A. E., & Adolphus, J. A. (2016). Munich Personal RePEc Archive Unemployment and Inflation: Implication on Poverty Level in Nigeria. In *Munich Personal RePEc Archive*. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79765/1/MPRA_paper_79765.pdf
- Statistik, B. P. (2019). Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen. Retrieved March 27, 2020, from BPS - Statistics Indonesia website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Statistik, B. P. (2020). Kemiskinan dan Penduduk Miskin. Retrieved March 30, 2020, from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Subanidja, S., & Suharto, E. (2014). The Dominant Factors in The Causes of Poverty Level in Indonesia. *Humanity and Social Sciences Review*, 3(1), 67–76.
- Suhendra. (2019). Pabrik Ramai-Ramai ke Jateng, di Banten Banyak Pengangguran. Retrieved April 17, 2021, from cnbcindonesia.com website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191111161239-4-114378/pabrik-ramai-ramai-ke-jateng-di-banten-banyak-pengangguran>

- Syofya, H. (2018). Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia Human Development Index. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(2), 416–423. <https://doi.org/DOI: 10.33087/jiubj.v18i2.486>
- Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 418–428.
- World Bank. (2019). Tingkat Kemiskinan dan Rentan Kemiskinan di Indonesia Tertinggi Ada di Perdesaan. Retrieved April 9, 2020, from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/tingkat-kemiskinan-dan-rentan-kemiskinan-di-indonesia-tertinggi-ada-di-perdesaan>